

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jambi

Seperti yang tertera dalam tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui kondisi tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Ketimpangan pembangunan ini diukur menggunakan Indeks Williamson, yang memperhitungkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Dalam konteks penelitian ini, parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku).

Berikut kriteria untuk menilai kategori keadaan tingkat ketimpangan pembangunan suatu wilayah dimana jika:

1. Nilai Indeks Williamson (IW): 0 - 0,29 (Ketimpangan Rendah)
2. Nilai Indeks Williamson (IW): 0,3 - 0,49 (Ketimpangan Sedang)
3. Nilai Indeks Williamson (IW): 0,5 - 1 (Ketimpangan Tinggi)

Dari hasil perhitungan ketimpangan pembangunan di provinsi Jambi dengan menggunakan Indeks Williamson (IW), diperoleh bahwa ketimpangan pembangunan di provinsi Jambi sejak tahun 2002 sampai tahun 2022 menunjukkan nilai indeks yang cukup berfluktuatif. Sejak tahun 2002 hingga 2022 rata-rata nilai Indeks Williamson tercatat sebesar 0,439 yang mana indeks tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan masuk kedalam kategori ketimpangan sedang. Selama periode penelitian tahun 2002 hingga 2022 ketimpangan pembangunan hanya berada pada 2 kategori yakni kategori sedang dan kategori tinggi, dan didominasi pada kategori sedang.

Untuk lebih jelasnya ketimpangan pembangunan yang digambarkan dengan nilai Indeks Williamson dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2002-2022

Tahun	Indeks Williamson	Kategori
2002	0,508	Tinggi
2003	0,427	Sedang
2004	0,421	Sedang
2005	0,445	Sedang
2006	0,430	Sedang
2007	0,409	Sedang
2008	0,420	Sedang
2009	0,445	Sedang
2010	0,533	Tinggi
2011	0,521	Tinggi
2012	0,515	Tinggi
2013	0,501	Tinggi
2014	0,480	Sedang
2015	0,420	Sedang
2016	0,391	Sedang
2017	0,403	Sedang
2018	0,441	Sedang
2019	0,432	Sedang
2020	0,352	Sedang
2021	0,355	Sedang
2022	0,363	Sedang
Rata-rata	0,439	Sedang

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2002 hingga 2022 nilai Indeks Williamson memiliki indeks yang cukup berfluktuatif dengan nilai indeks terbesar terjadi pada tahun 2010 yakni dengan indeks 0,533 dimana pada tahun tersebut terjadi kenaikan Indeks Williamson sebesar 0,088. dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 0,445 pada tahun 2009. Sedangkan untuk penurunan nilai Indeks Williamson terbesar yakni terjadi pada

tahun 2020 dimana nilai Indeks Williamson mampu turun sebesar 0,08 dari 0,432 pada tahun 2019 menjadi 0,352 pada tahun 2020.

Jika dilihat dari awal tahun penelitian yakni tahun 2002 nilai Indeks Williamson adalah sebesar 0,508 mengalami penurunan hingga menjadi 0,427 pada tahun 2003, dengan angka penurunan yang cukup besar yakni 0,081 kembali mengalami penurunan pada tahun 2004 sebesar 0,006 dengan Indeks Williamson tercatat sebesar 0,421 penurunan ini cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun 2003.

Pada tahun 2005, terjadi peningkatan Indeks Williamson, mencapai 0,445. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2006, terjadi penurunan sebesar 0,015, sehingga Indeks Williamson turun menjadi 0,430. Perubahan ini berlanjut hingga tahun 2008, di mana Indeks Williamson mencatatkan angka 0,420. Namun, pada tahun 2009, terjadi kenaikan kembali, dengan Indeks Williamson mencapai 0,445.

Pada tahun 2011, terjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga Indeks Williamson mencapai 0,521. Namun, tren penurunan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, mencapai titik terendah pada tahun 2016 dengan Indeks Williamson sebesar 0,391. Namun, penurunan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2017 dan 2018, Indeks Williamson mengalami peningkatan lagi, masing-masing mencapai 0,403 dan 0,441, menggambarkan ketimpangan pembangunan yang meningkat. Pada tahun 2019 hingga 2022 nilai Indeks Williamson berfluktuatif hingga pada tahun terakhir penelitian yakni 2022 Indeks Williamson tercatat sebesar 0,363.

5.2 Pengaruh Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel seperti Belanja Langsung, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2002 hingga 2022. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan analisis dengan menggunakan model regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak statistik E-Views 9.

Melalui analisis regresi berganda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang disebutkan sebelumnya dengan tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan hasil pengolahan data dari model regresi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut selama periode waktu yang diteliti.

5.2.1 Hasil Pengujian Terhadap Pengujian Asumsi Klasik

5.2.1.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merujuk pada keadaan di mana terdapat korelasi linear yang kuat, bahkan bisa mencapai tingkat yang sempurna “*perfect*”, di antara beberapa atau seluruh variabel independen dalam model regresi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen dalam model. Dalam konteks penelitian ini, Multikolinearitas dievaluasi menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). VIF memberikan indikasi apakah terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar kemungkinan terjadi multikolinearitas antara variabel independen, yang dapat mengganggu interpretasi hasil analisis regresi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, VIF digunakan sebagai alat untuk menilai kehadiran atau absennya multikolinearitas antara variabel independen. Dengan mengamati nilai output EViews 9 di uji Auxiliary, maka dapat dihitung nilai VIF sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Variance Inflation Factor

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF	Keterangan
C	0.052883	1480.357	NA	
BL	7.87E-16	38.07712	7.964410	Non Multikolinearitas
PAD	7.40E-16	27.89933	7.152356	Non Multikolinearitas
PMDN	7.51E-19	5.212005	1.878936	Non Multikolinearitas
IPM	1.08E-05	1468.323	1.291469	Non Multikolinearitas

Sumber: Diolah (2024), EViews

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 5.2 nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Belanja Langsung (BL), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kurang dari 10. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas di antara variabel independen yang digunakan dalam analisis.

5.2.1.2 Uji Heterokedastisitas

Hasil regresi heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah R-squared dari setiap variabel independen (Belanja Langsung, PAD, PMDN, dan

IPM), yang mempengaruhi variabel dependen (ketimpangan pembangunan), memiliki varians yang sama. Ketika heteroskedastisitas terjadi, penaksir Ordinary Least Squares (OLS) tetap tidak bias dan konsisten, tetapi penaksir tersebut tidak lagi efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Dalam penelitian ini, Uji White digunakan untuk mengevaluasi heteroskedastisitas dengan melihat nilai Probabilitas Chi-Square (Obs * R-squared). Berikut ini model Heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 Hasil Regresi Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.272391	Prob. F(14,6)	0.9789
Obs*R-squared	8.160516	Prob. Chi-Square(14)	0.8808
Scaled explained SS	2.654296	Prob. Chi-Square(14)	0.9995

Sumber: Diolah (2024)

Hasil dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa Probabilitas Chi-Square sebesar 0,8808, yang lebih besar dari nilai ambang signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

5.2.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi, yang menggunakan metode Breusch-Godfrey dan sering disebut sebagai uji Lagrange Multiplier (LM), dievaluasi melalui Probabilitas Chi-Square. Masalah autokorelasi umumnya terjadi dalam data time series. Model autokorelasi yang diamati dapat ditemukan dalam tabel 5.4 di bawah ini:

Tabel 5.4 Hasil Regresi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

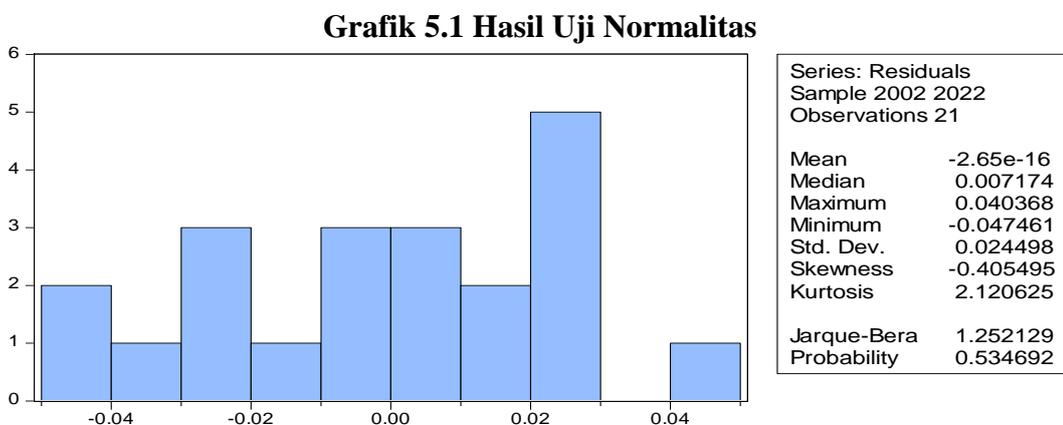
F-statistic	0.636763	Prob. F(2,14)	0.5437
Obs*R-squared	1.751007	Prob. Chi-Square(2)	0.4167

Sumber: Diolah (2024)

Dari Tabel 5.4 didapatkan bahwa nilai Probabilitas Chi-Square (0,4167) lebih besar dari nilai α yang ditetapkan, yaitu 0,05. Karena nilai Probabilitas Chi-Square tidak signifikan dalam model pengujian Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam hubungan antara Belanja Langsung, PAD, PMDN, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan.

5.2.1.4 Hasil Uji Normalitas

Uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai apakah nilai variabel pengganggu dari model yang dibentuk memiliki distribusi normal atau tidak. Pendekatan yang digunakan dalam uji normalitas adalah metode Jarque-Berra. Residual dianggap memiliki distribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dibawah ini terdapat grafik uji normalitas untuk evaluasi tersebut:



Sumber: Diolah (2024)

Berdasarkan grafik 5.1 diatas diperoleh bahwa nilai Probabilitas J-B hitung sebesar 0,534692 yang berarti lebih besar dari nilai α (0,05). Dimana $0,534692 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa dengan pendekatan *Jarque-Berra test* maka variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima atau model memenuhi distribusi normal.

5.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

5.2.2.1 Uji Statistik F

Uji F-Statistik digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Proses ini melibatkan perbandingan dengan tingkat signifikansi, yang umumnya ditetapkan pada $\alpha = 0,05$ atau 5 persen. Jika tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, menandakan bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil dari regresi linear berganda, yang digunakan untuk menguji statistik F, dapat dilihat dalam tabel 5.5 di bawah ini:

Tabel 5.5 Hasil Regresi F-Statistik

R-squared	0.795103	Prob(F-statistic)	0.000023
F-statistic	15.52199	$\alpha = *0,01$ ** 0,05 *** 0,10	

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 5.5 nilai F hitung diperoleh sebesar 15.52199 dengan probabilitas 0,000023, atau lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan nilai probabilitas tersebut ($0,000023 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima pada tingkat keyakinan 95 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Langsung, PAD, PMDN, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini secara kuat dan signifikan terbukti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

5.2.2.2 Uji Statistik t

Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Proses pengujian ini melibatkan perbandingan nilai probabilitas t-hitung dengan tingkat signifikansi α . Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai probabilitas t-hitung lebih besar dari α , maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang mengindikasikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas t-hitung lebih kecil dari α , maka H_0 ditolak, menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji regresi statistik t dapat ditemukan dalam tabel 5.6 di bawah ini:

Tabel 5.6 Hasil Regresi Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BL	7.18E-08	2.80E-08	2.560457	0.0210 **
PAD	-8.92E-08	2.72E-08	-3.278357	0.0047 *
PMDN	-1.74E-09	8.67E-10	-2.004678	0.0622 ***
IPM	-0.020437	0.003284	-6.222436	0.0000 *
Level Significant : *1%		** 5%	*** 10%	

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

a. Variabel Belanja Langsung

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Belanja Langsung (BL) memiliki nilai t hitung sebesar 2,5604 dengan probabilitas 0,0210, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,0210 < 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Langsung secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar -3,2783 dengan probabilitas 0,0047, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$ ($0,0047 < 0,01$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

c. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel PMDN memiliki nilai t hitung sebesar -2,0046 dengan probabilitas 0,0622, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,10$ ($0,0622 < 0,10$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel PMDN secara individual berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

d. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai t hitung sebesar -6,2224 dengan probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$ ($0,0000 < 0,01$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

5.2.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, dinyatakan dalam persentase. Nilai R^2 -Square dari hasil regresi dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7 Hasil Regresi R^2 -Square

R-squared	0.795103	$\alpha = *1\% ** 5\% *** 10\%$
-----------	----------	---------------------------------

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Dari tabel 5.7 tersebut, didapatkan hasil estimasi dengan nilai R-Square sebesar 0,7951. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas, seperti Belanja Langsung, PAD, PMDN, dan IPM, secara keseluruhan memiliki dampak terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi sebesar 79,51 persen secara simultan. Sebesar 20,49 persen sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model yang digunakan.

5.2.3 Hasil Estimasi Model Regresi Linear Berganda

Proses estimasi model penelitian dilakukan berdasarkan pada sistem persamaan model yang telah dikembangkan, dengan merujuk pada model yang telah diusulkan, untuk menilai dampak variabel Belanja Langsung (BL), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi dari tahun 2002 hingga 2022. Proses ini melibatkan pengolahan data yang diregresi menggunakan model analisis regresi berganda. Hasil estimasi model empiris diperoleh dari perhitungan yang terdokumentasi dalam tabel 5.8:

Tabel 5.8 Hasil Perhitungan Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.890675	0.229964	8.221615	0.0000
BL	7.18E-08	2.80E-08	2.560457	0.0210 **
PAD	-8.92E-08	2.72E-08	-3.278357	0.0047 *
PMDN	-1.74E-09	8.67E-10	-2.004678	0.0622 ***
IPM	-0.020437	0.003284	-6.222436	0.0000 *
R-squared	0.795103	Prob(F-statistic)	0.000023	
F-statistic	15.52199	Level Of Significant:		
		*	0,01	
		**	0,05	
		***	0,10	

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Berdasarkan tabel 5.8 diatas maka diperoleh hasil model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{KP_t = 1.890675 + 0,0000000718 BL_t - 0,00000000892 PAD_t - 0,000000174 PMDN_t - 0.0204367584737 IPM_t}$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,8906751 menandakan bahwa tanpa kehadiran variabel seperti Belanja Langsung (BL), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat Ketimpangan Pembangunan dapat meningkat sebesar 1,8906751. Dengan kata lain, bahkan tanpa keterlibatan dari variabel-variabel tersebut, tingkat ketimpangan pembangunan tetap akan ada.

Nilai koefisien BL atau Belanja Langsung sebesar 7.18E-08 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan BL atau Belanja Langsung sebesar 1 juta rupiah hal ini akan mengakibatkan peningkatan/memperburuk Ketimpangan Pembangunan sebesar 0,0000000718. Signifikan t sebesar 0,0210 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dan positif antara BL (belanja langsung) terhadap KP (ketimpangan pembangunan).

Perolehan nilai koefisien PAD atau Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar - 8.92E-08 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan PAD atau Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,00000000892. Signifikan t sebesar 0,0047 lebih kecil dari 0,01 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti ada pengaruh yang

signifikan dan negatif PAD (pendapatan asli daerah) terhadap KP (ketimpangan pembangunan).

Besar nilai koefisien PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri yakni sebesar $-1.74E-09$ menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan PMDN sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan sebesar $0,000000174$. Signifikan t sebesar $0,0622$ atau lebih kecil dari $0,10$ menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dan negatif PMDN (penanaman modal dalam negeri) terhadap KP (ketimpangan pembangunan).

Untuk nilai koefisien IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yakni sebesar $-0,02043$ menunjukkan peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 indeks dapat menurunkan KP (ketimpangan pembangunan) sebesar $0,02043$, dengan nilai signifikan t sebesar $0,0000$ lebih kecil dari $0,05$ menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan negatif IPM (indeks pembangunan manusia) terhadap KP (ketimpangan pembangunan).

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi, atau R-Square, sebesar $0,7951$. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel BL (belanja langsung), PAD (pendapatan asli daerah), PMDN (penanaman modal dalam negeri), dan IPM (indeks pembangunan manusia) secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap KP (ketimpangan pembangunan) di Provinsi Jambi. Mereka mampu menjelaskan variasi ketimpangan pembangunan sebesar $79,51$ persen secara simultan, sedangkan $20,49$ persen sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi yang digunakan.

5.2.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Belanja Langsung memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Temuan ini konsisten dengan hipotesis awal yang diajukan, bahwa variabel Belanja Langsung memengaruhi secara signifikan ketimpangan pembangunan. Namun didapati dalam penelitian bahwa pengaruh Belanja Langsung justru bernilai positif yang jika diartikan peningkatan belanja langsung justru sejalan dengan peningkatan ketimpangan pembangunan atau semakin memperburuk kondisi ketimpangan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian Marihot (2020) diperoleh hasil bahwa makin bertambah belanja pemerintah makin meningkat pula ketimpangan/indeks Williamson di Indonesia.

Hal ini dikarenakan terdapat belanja pemerintah yang tidak memadai seperti didominasi oleh belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal, sehingga mengakibatkan dampak negatif yang justru memperburuk ketimpangan.

Sedangkan variabel PAD (pendapatan asli daerah) memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi Jambi yang mana hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi Jambi dan bernilai negatif yang berarti peningkatan PAD mampu menurunkan ketimpangan pembangunan atau memperbaiki ketimpangan pembangunan yang terdapat di provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, dkk (2013) dimana diperoleh hasil bahwa PAD memiliki pengaruh

negatif terhadap ketimpangan pembangunan dikarenakan seiring dengan kenaikan PAD maka alokasi dari PAD tersebut dapat dialokasikan pada belanja-belanja yang bersifat public yang dapat menurunkan ketimpangan.

Ini juga mengikuti kesimpulan Natha (2020), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendapatan dan pendanaan bagi pemerintah daerah, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan kewenangan daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi kemampuan dalam menghasilkan PAD, semakin besar perhatian pemerintah dalam mengalokasikan dana pembangunan, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

Untuk variabel PMDN (penanaman modal dalam negeri) memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang diduga PMDN berpengaruh signifikan dan bernilai negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2021) diperoleh bahwa investasi (PMDN) mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dan mempunyai arah negatif di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan PMDN merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat atau daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Hasil terakhir berkaitan dengan pengaruh variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan, yang mengindikasikan bahwa IPM memengaruhi secara signifikan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi, dan memiliki nilai

negatif, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin rendah atau semakin baik ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

Hasil tersebut sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti dan Asti (2021), yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa IPM memberikan gambaran tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah, maka akan semakin meningkatkan kualitas SDM, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut.

5.3 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan di provinsi Jambi dipengaruhi oleh belanja langsung, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri dan indeks pembangunan manusia
2. Pengalokasian belanja langsung perlu diperbaiki sehingga belanja langsung mampu berkontribusi dalam upaya menurunkan ketimpangan pembangunan dengan mengalokasikan dana belanja lebih kepada hal-hal yang dapat dinikmati secara general atau publik.
3. Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini memungkinkan berbagai aspirasi dan

inisiatif masyarakat untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan secara lebih optimal guna mengembangkan potensi-potensi local.

4. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di provinsi Jambi dengan melakukan upaya mendorong peningkatan sektor riil yang ditujukan khususnya pada masyarakat menengah kebawah seperti pelatihan keterampilan seperti UMKM yang potensial sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga hal tersebut dapat memajukan daerah tertinggal sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan.